

## EVALUASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR

Taufik Hidayat<sup>1</sup>, Aji Ratna Kusuma<sup>2</sup>, Enos Paselle<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kutai Timur

<sup>2</sup>Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

<sup>3</sup>Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Korespondensi: upikhdy@gmail.com

**Abstract:** *This study aims to describe the evaluation results of the Family Planning Village Program in Swarga Bara Village, Sangatta Utara District. This research is a qualitative descriptive research. The technique of collecting data was done by interviewing, observing, and documenting, which were then analyzed using an interactive analysis model and testing the validity of the data by means of triangulation of sources. The results show that the implementation of the Family Planning Village Program in general has not been going well, this can be seen from the indicators of input, process and output that are not achieved, such as increasing the capacity of family planning counselors who are minimal, the provision of supporting facilities and infrastructure is still limited, the lack of support budget, low community participation in fostering family resilience and empowerment, population services that do not work and the achievements of active family planning participants, participation in group activities and family data collection that do not reach the set of targets, The only on family planning service activities that can run well.*

**Keywords:** *Village Family Planning Program, Input, Process, Output.*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil evaluasi dari Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif dan dilakukan pengujian keabsahan data dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana secara umum belum berjalan dengan baik hal tersebut terlihat dari indikator input, proses dan output yang tidak tercapai seperti peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh Keluarga Berencana yang minim dilakukan, peyediaan sarana dan prasarana pendukung yang masih terbatas, minimnya dukungan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat pada pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pelayanan kependudukan yang tidak berjalan serta capaian peserta Keluarga Berencana aktif, partisipasi kelompok kegiatan serta pendataan keluarga yang tidak mencapai target yang ditetapkan, hanya pada kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana yang dapat berjalan dengan baik.*

**Kata Kunci :** *Program Kampung Keluarga Berencana, Input, Proses, Output.*

### Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan salah satu dasar peraturan dalam melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dilapangan. Undang-undang tersebut juga menjadi dasar kewenangan BKKBN dalam menjalankan tugas dan kewajiban dibidang keluarga berencana, pengaturan jumlah penduduk dan pembangunan keluarga, dalam rangka menjadikan tatanan penduduk yang merata dan berbanding dengan perekonomian masyarakat dengan tujuan menjadikan masyarakat mencapai suatu kesejahteraan tanpa adanya kesenjangan ekonomi yang begitu tajam.

Namun, pada kenyataannya sekarang ini dalam perkembangannya program Keluarga Berencana mengalami stagnasi pencapaian program Keluarga Berencana dimana TFR stagnan pada angka 2,6, kemudian LPP Indonesia diangka 1,38% atau mengalami peningkatan 3 juta jiwa pertahunnya.. Hal ini akan mempengaruhi pembangunan dan pemanfaatan bonus demografi Indonesia jika tidak dikelolla dengan baik (juknis Kampung KB,2015).

Berdasarkan hasil evaluasi internal BKKBN dan berdasarkan arahan bapak Presiden terkait upaya peningkatan daya ungkit program KKBPK pada periode 2015-2019, maka disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program KKBPK dilapangan, atas arahan atau petunjuk bapak Presiden kemudian ditindaklanjuti secara serius dan masif dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mendagri No.440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016, perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB seluruh Indonesia.

Berdasarkan amanah dan intruksi tersebut maka dibentuk Kampung KB diselurh Indonesia minimal 1 Kecamatan 1 Kampung KB, dan Kabupaten Kutim sendiri melaksanakan amanah dan intruksi tersebut, namun dalam pelaksana implementasinya banyak mengalami hambatan dan masalah, dari masalah pentuan lokasi, pembentukan, partisipasi masyarakat, kerjasama antar organisasi dan mitra kerja yang terlibat, proporsional jumlah PKB/PLKB, dukungan anggran, sarana prasaran pendukung, Pelayanan KB & KR, Pendataan Keluarga , Pencapaian dan Peningkatan POKTAN serta sampai pada partisipasi masyarakatnya sendiri terhadap program Kampung KB ini. Masalah itu salah satunya terjadi di Kecamatan Sangatta Utara atas dibentuknya Kampung KB pada Kecamatan tersebut.

Berdasarkan Data BPS Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kutim setiap periodenya mengalami peningkatan, seperti tahun 2010-2017 LPP kutim sebesar 4,37%, kemudian melonjak derastis naik pada 2010-2018 sebesar 4,97%. Kalau kita melihat data dalam kurun waktu 1 tahun sudah ada peningkatan 0,6%, atau dari jumlah penduduk kutim tahun 2017 sebesar 347.468 jiwa kemudian naik pada tahun 2018 sebesar 361.670 jiwa (<https://bps.go.id>, 2019).

Fakta lapangan lainnya menunjukkan bahwa terkait dengan pencapaian 3 indikator (input, proses dan output) dalam kampung KB tersebut mengalami berbagai masalah dan hambatan. Pada tahap input hambatan dan masalah yang dihadapi adalah pada proporsional PKB/PLKB dan TPD dilapangan walaupun telah memenuhi standar yakni minimal 1 Desa 1 PKB/PLKB dan TPD, dimana untuk sangatta utara memiliki 7 PKB/PLKB dan TPD, namun titik masalahnya ada pada kualitas sumberdaya manusianya yang belum mumpuni. Selanjutnya terkait dengan penganggaran dan sarana pendukung lainnya masih belum maksimal, dimana untuk anggaran belum mendapat dukungan penuh dari APBD saat ini sejak tahun 2018-2019 baru mendapat dukungan melalui APBN dalam bentuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang merupakan dana stimulus saja, sedangkan untuk sarana pendukung sudah mulai terpenuhi seperti adanya Balai Penyuluh KB sebagai pusat kegiatan Kampung KB namun belum ditunjang dengan sarana KIE dan advokasi lainnya.

Masalah lain yang dihadapi dalam program Kampung KB adalah pada proses pelaksanaannya terkait mengadvokasi mitra kerja dan sosialisasi program tersebut, kemudian peningkatan layanan keliling Keluarga Berencana, pertemuan berkala kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, yang minim pertemuan sehingga

berdampak pada keberhasilan output khususnya kegiatan pada tribuna (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS yang masih rendah partisipasi masyarakatnya.

Untuk itu pada penelitian ini, penulis tertarik melakukan Evaluasi Program Kampung KB di Kecamatan Sangatta Utara yang terletak di Desa Swarga Bara dikarenakan Program Kampung KB ini merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam upaya mengatasi masalah kependudukan, kemiskinan dan memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengintegrasikan Program KKBP di Kampung KB.

Adapun penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, kemudian mengetahui dan mendeskripsikan pencapaian Program Kampung KB tersebut dalam upaya meningkatkan kualitas masyarakat di Kampung KB serta mengetahui dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Program Kampung KB di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.

### **Kerangka Konsep dan Teori Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dari sebuah proses pembuatan kebijakan dari evaluasi ini di hasilkan masukan-masukan guna penyempurnaan kebijakan atau perumusan kebijakan selanjutnya. Evaluasi di butuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang ada di lapangan.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2012:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang di timbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya, sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Agustino (2008:46-48) kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan, melingkupi :

- a. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program, dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
- b. Tindakan yang ditempuh oleh *Implementing Agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel dan adil ini, dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak asasi manusia ketika kebijakan dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar perikehidupan warga.
- c. Efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri, dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk memberi informasi yang valid dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan *right to know* bagi warga masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, menurut hemat penulis bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan serta dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan atau keputusan selanjutnya.

Menurut Bridgman & Davis (2000:130) ada empat indikator pokok dalam menilai suatu kebijakan publik secara umum yaitu : (1) indikator input, (2) indikator process, (3) indikator outputs dan (4) indikator outcomes, berikut penjelasannya :

1. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator outputs (keluaran) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. Indikator outcomes (hasil) memfokuskan diri pada pertanyaan akibat dan hasil yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

### **Program Kampung Keluarga Berencana**

Menurut Juknis BKKBN Tahun 2015 Pengertian Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah, Pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

Secara umum tujuan dibentuknya Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Selain itu terkait suksei Program Kampung KB ini dapat diukur melalui indikator yang ditetapkan berdasarkan Juknis BKKBN terkait indikator keberhasilan Kampung KB yang dapat diukur melalui keberhasilan input yang dilihat dari proporsional jumlah PLKB/PKB disuatu Kampung KB, kemudian ketersediaan yang optimal terkait dukungan operasional (anggaran) untuk program KKBPK dari APBD dan APBN maupun sumber dana lainya yang syah serta ketersediaan sarana dan prasaran operasional di Kampung KB.

Selanjutnya keberhasilan proses dapat diukur dari: 1). kegiatan advokasi dan KIE; 2). Peningkatan kualitas pelayanan KB 3). Pembinaan Kelompok Kegiatan dan Pemberdayaan Ketahanan Keluarga; 4).Pelayanan Kependudukan yang terintegrasi di Kampung KB

Sedangkan keberhasilan "Output" ditentukan berdasarkan pada Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari Pendataan Keluarga, pencapaian peserta KB aktif dan MKJP diatas rata-rata pencapaian per-desa atau kelurahan serta tingginya partisipasi dari kelompok kegiatan (BKB,BKL,BKR dan UPPKS).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif (Moleong,2013), yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penilaian dan memperoleh pemahaman yang mendalam serta meyeluruh tentang pelaksanaan dari Program Kampung KB di

Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dengan fokus pada indikator input, proses dan output (Bridgman & Davis, 2000, Badjuri & Yuwono, 2002) Kampung KB serta faktor pendukung dan faktor penghambat program tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling* (Nasution dalam Prastowo, 2016), kemudian pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2015), selanjutnya dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman dan Saldana, 2014). Selanjutnya diadakan pengujian terhadap keabsahan data dengan triangulasi sumber (Wiliam Wiersma dalam Sugiono, 2012). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung KB Bersemi Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

## **Hasil dan Pembahasan**

Evaluasi merupakan tindakan untuk memberikan penilaian pada suatu kebijakan atau program yang ditetapkan guna untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang ada di lapangan yang kemudian digunakan kembali menjadi masukan atas kebijakan atau program yang diambil sebagai peyempurna kebijakan dan program tersebut.

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah evaluasi program kampung keluarga berencana di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dimana evaluasi yang dilakukan secara umum mengacu pada empat *indikator* pokok yaitu : *Indikator input, indikator proses, indikator output, Faktor Pendukung dan Penghambat.*

### ***Evaluasi Program Kampung KB di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.***

Dalam konteks ini yang di evaluasi adalah Program Kampung KB yang ada di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan 3 konteks atau indikator yakni mulai evaluasi dari input atau masuknya yang dinilai dari jumlah PKB/PLKB dilapangan, dukungan anggaran yang diberikan, saran dan prasarana pendukung di Kampung KB, kemudian proses diukur melalui pelaksanaan pelayanan program tersebut seperti pelayanan KB, pelayanan kependudukan, kegiatan advokasi masyarakat dan mitra kerja serta KIE dan terakhir pembinaan dan pemberdayaan ketahanan keluarga, selanjutnya output atau keluarahan yang dihasilkan oleh program diukur melalui pendataan keluarga, peserta capaian Kb aktif, partisipasi kelompok kegiatan dalam Program Kampung KB tersebut serta faktor pendukung dan faktor penghambat dari program tersebut dengan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Bridgman & Davis, Crossfield & Byrner, dan Badjuri & Yuwono.

### ***Input***

Indikator input dalam penelitian ini berkaitan dengan penilaian terhadap penggunaan sumberdaya materi atau non materi pendukung yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Indikator input ini berkaitan dengan anggaran atau pendanaan kemudian sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung lainnya. Pada penelitian ini membatasi indikator input pada Sumber Daya Manusia (SDM) di Kampung KB dalam hal ini PKB/PLKB yang ada di Kampung KB, kemudian pada sumber daya anggaran yang disediakan dan sarana prasarana pendukung lainnya di Kampung KB tersebut.

Terkait dengan ketersediaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) atau Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Tenaga Penggerak Desa (TPD) saat ini sudah terpenuhi dengan baik, dimana dalam hal ini untuk kebutuhan Tenaga PKB/PLKB dan TPD standarnya adalah 1 Kampung KB atau Desa 1 Tenaga PKB/PLKB dan TPD dan untuk Kecamatan Sangatta Utara khususnya Kampung KB Desa Swarga Bara kebutuhan Tenaga Penyuluh KB tersebut telah memenuhi standar yang ada, dimana Tenaga PKB/PLKB dan TPD yang ada disana berjumlah 6 orang. Namun dengan pemenuhan Tenaga PKB/PLKB dan TPD yang sesuai standar tidak di dukung dengan penguatan kapasitas dan keahlian dalam pengelolaan Kampung KB. Padahal Tenaga PKB/PLKB dan TPD merupakan garda terdepan penggerak dalam pengelolaan Kampung KB, sampai tahun 2019 Tenaga PKB/PLKB dan TPD belum pernah diberikan pelatihan terkait dengan pengelolaan Kampung KB oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur sebagai penanggungjawab di daerah hanya pernah dilakukan pelatihan oleh pihak BKKBN Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1 kali dan pelatihan itu dihadiri oleh tenaga kader bukan tenaga PKB/PLKB dan TPD terkait pengelolaan Kampung KB tersebut.

Selanjutnya terkait dengan dukungan anggaran Kampung KB selama ini sejak dibentuknya Kampung KB di Desa Swarga Bara pada tahun 2017 dan sampai tahun 2019 untuk kegiatan operasionalnya hanya mengandalkan dana BOKB yang bersumber dari DAK Non-Fisik yang jika di rata-rata setiap Kecamatan mendapat 95 juta yang kemudian di bagi sesuai dengan Kampung KB yang ada dalam Kecamatan tersebut, untuk Kecamatan Sangatta Utara ini sendiri hanya memiliki 1 Kampung KB sehingga menerima 95 juta untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam juknis BOKB tersebut, dimana kegiatan tersebut seperti pertemuan kelompok kerja di Kampung KB yang dilakukan 6 kali dalam 1 tahun, kemudian pertemuan forum musyawarah tingkat Desa di kampung KB yang membahas program kerja dan perkembangan Kampung KB yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun, selanjutnya ada lokakarya mini dan kegiatan operasional untuk para kader masing-masing 1 kali dalam 1 tahun yang kemudian dirasa kurang cukup untuk membiaya itu semua.

Ketidak cukupan anggran tersebut dilandasi atas rencana anggran yang disusun oleh Bidang Penyuluhan dan Pergerakan, dimana bidang tersebut adalah bidang yang dominan dalam pengelolaan Kampung KB, berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan jika dirata-rata kebutuhan per Kampung KB adalah Rp. 150.000.000, dimana jumlah anggran tersebut dari 95 juta dialokasikan dari dana BOKB dan 55 Juta seharusnya yang kurang dapat diambilkan dari sumber-sumber ketentuan pembiayaan Kampung KB tersebut, terutama penganggaran melalui APBD.

Selain itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaran di Kampung KB sejauh ini bertahap di penuhi sesuai sekala prioritas, saat ini sarana kerja yang tersedia adalah *smart phone* bagi PKB/PLKB untuk pendataan, namun *smart phone* yang disediakan belum memenuhi standar pekerja sehingga tidak memberikan dukungan yang optimal untuk pendataan keluarga, kemudian telah adanya Balai Penyuluh di kecamatan, namun Balai Penyuluh tersebut digunakan untuk kegiatan umum pelayanan KB bukan terkhusus untuk Kampung KB seharusnya dibangun Sekretariat Khusus Kampung KB dimana bangunan tersebut yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kampung KB, seperti

penyuluhan, rapat kerja, forum musyawarah antar warga dan lain sebagainya , selanjutnya untuk kebutuhan dalam pembinaan kelompok kegiatan juga masih minim seperti alat permainan dan edukasi bagi kelompok kegiatan Tri Bina (BKB,BKR,BKL). Sedangkan untuk prasarana jalan akses menuju Kampung KB masih bertahap diperbaiki, namun dari sisi pembangunan secara umum wilayah Kampung KB dari tahun ketahun mengalami kemajuan baik dari sisi pembangunan Infrastrukturnya maupun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Jadi secara umum untuk indikator input yang terdiri dari Tenaga PKB/PLKB dan TPD di Kampung KB, dukungan anggaran untuk Kampung KB dan ketersediaan sarana dan prasaran di Kampung KB yang memadai di Kampung KB Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara masih belum optimal atau maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak dari point-point tersebut yang belum terpenuhi dengan baik seperti kemampuan teknis seorang PKB/PLKB dan TPD dalam manajemen Kampung KB, kemudian dukungan anggaran yang tidak ada dari APBD dan dukungan sarana kerja bagi penyuluh yang masih dirasa kurang memadai.

### ***Proses***

Indikator proses dalam penelitian ini merupakan penilaian satu kebijakan yang diberikan kepada masyarakat berupa pelayanan langsung yang diterima oleh masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Indikator proses dalam konteks penelitian ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Program Kampung KB seperti kegiatan mengadvokasi dan mengkomunikasi, memberikan edukasi dan informasi yang benar dan tepat terkait dengan Program Kampung KB selain itu juga di dalamnya ada kegiatan pemberian Pelayanan Kependudukan terkait layanan pembuatan KK, KTP dan sejenisnya selanjutnya ada pelayanan terkait dengan Pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan lainnya. Terkait kegiatan advokasi dan KIE sekaitan dengan mengadvokasi para mitra kerja yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sejauh ini masih pada tataran seremonial dimana kegiatan advokasi ini dilakukan melalui surat meyurat kemudian penyuluhan dengan memberikan paparan penjelasan melauai power point kemudian tidak ditindaklanjuti dengan melakukan perjanjian kerja sama atau sejenisnya untuk mengikat para mitra kerja secara legal dan kuat, selain itu juga kegiatan advokasi ini dan KIE ini belum di optimalkan melauai forum-forum desa yang dilakukan atau pertemuan antar kelompok, pertemuan itu hanya dilakukan secara satu arah tidak melibatkan masyarakat secara aktif untuk terlibat.

Selanjutnya terkait Pelayanan kependudukan dalam konteks ini adalah berkaitan dengan tindakan berupa pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat di wilayah Kampung KB. Sampai dengan tahun 2019 belum dapat berjalan atau dilaksanakan di Kampung KB salah satu kendalanya adalah belum terintegrasinya antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga pelayanan kependudukan belum pernah dilakukan di Kampung KB, salah satu peyebabnya belum memiliki MoU atau Perjanjian Kerja Sama sebagai landasan intervensi bagi Dinas terkait untuk memberikan pelayanan tersebut.

Lain halnya dengan Pelayanan KB berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait gambaran umum pelayanan KB di Kampung KB Desa Swarga

Bara sudah cukup baik dimana untuk tenaga medis telah tersedia baik di Faskes tingkat 1 maupun di Dinas PP&KB sendiri yang telah bersertifikat sebanyak 3 orang. Namun dalam hal pelayanan secara periodik atau berkala masih terbilang rendah yang terkendala dengan pendanaan yang ada. Selain itu terkait dengan kemudahn layanan dalam pelayanan KB di Kampung KB terbilang baik dimana dapat dirasakan melalui fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat di wilayah Kampung KB yang mudah untuk diakses atau mendapatkan layanan serta cepat tanggap memberikan layanan, dimana untuk puskesmas sendiri ada 7 diwilayah tersebut yang mudah untuk diakses selain itu juga dibantu dengan 7 posyandu yang ada. Selain itu juga telah terpenuhinya Alat Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Faskes tingkat 1 atau di Dinas terkait yang dapat diakses atau didapat masyarakat secara gratis.

Sedangkan terkait dengan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga yang difokuskan pada pembinaan kelompok tribina (BKB,BKR dan BKL) serta kelompok (UPPKS) telah berjalan dan dibentuk kelompok kegiatan di masing-masing kelompok pembinaan, dimana untuk Kampung KB Desa Swarga Bara sendiri telah memiliki 4 Kelompok BKB dan 1 Kelompok Lansia dimana kegiatan pembinaan tersebut rutin dilakukan minimal 1 bulan 1 kali. Sedangkan untuk Kelompok BKR ada 1 kelompok kegiatan, namun pada pembinaan kelompok BKR masih terbilang rendah disebabkan rendahnya partisipasi dari kelompok tersebut. Sedangkan untuk pembinaan kelompok UPPKS sendiri sejauh ini juga masih terbilang rendah, dimana saat ini ada 3 kelompok yang sudah dibentuk walaupun itu masih kurang dari target yang ditentukan dimana disana masih banyak keluarga yang belum terlibat, puluhan bahkan ratusan keluarga yang masih minim partisipasi keterlibatannya, salah satu kendala yang dihadapi minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah setempat untuk mendukung secara penuh kelompok UPPKS ini untuk menjadi mandiri atau menguatkan ekonomi keluarga khususnya dukungan dalam bentuk permodalan dan pelatihan serta pembinaan secara berkala. Jadi secara keseluruhan terkait pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga terkait pembinaan tribina dan kelompok UPPKS ini dirasa masih belum maksimal khususnya pada kelompok UPPKS yang minim permodalan dan pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk memasarkan dan meningkatkan nilai jual produknya.

### **Output**

Indikator output atau keluaran dari Program Kampung Keluarga Berencana ini yang dimaksud pada penelitian ini adalah dalam konteks hasil-hasil yang dihasilkan dari Program Kampung Keluarga Berencana ini seperti Pendataan Keluarga yang merupakan basis atau dasar utama untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Kampung KB, kemudia capain peserta KB yang merupakan salah satu sasaran dari Program Keluarga Berencana KB mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam Program KB kemudia partisipasi dari berbagai kelompok kegiatan yang di kususkan pada kelompok Tri Bina (BKB, BKR dan BKL) serta kelompok UPPKS yang ada di Kampung Keluarga Berencana (KB) tersebut.

Terkait dengan Pendataan Keluarga saat dibentuknya Kampung KB capainya baru 13% untuk wilayah Kampung KB yang berada di Kecamatan Sangatta Utara namun ketika penelitian yang penulis lakukan ditahun 2019 berdasarkan hasil penelitian yang ada telah terdata 75% sampai dengan tahun 2019, masih ada tersisa 25% yang belum terdata yang terkendala oleh pembiayaan yang belum

optimal, hal ini menjadi satu tantangan tersendiri sebab ukuran pencapaian kesuksesan suatu kampung KB dilihat dari hasil pendataan yang harus dilakukan 100% dimana lokasi ditunjuknya Kampung KB tersebut berdasarkan juknis Kampung KB. Sekaitan dengan gambaran umum dari hasil pendataan keluarga yang dilakukan tersebut terkait tingkat kesejahteraan masyarakat di Kampung KB Desa Swarga Bara dapat dilihat bahwa berdasarkan data tingkat kesejahteraan masyarakat tahun 2018-2019, jika kita melihat pertahun bahwa di tahun 2018 ada satu keluarga yang termasuk Pra KS dan ada 13 yang kategori sejahtera 1 dari 131 keluarga yang ada ini menandakan bahwa Program Kampung KB yang ada memberikan efek yang positif terkait dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditingkat kampung, pasalnya dari 131 keluarga yang ada hanya 1 masuk kategori Keluarga Pra KS dan 13 yang Sejahtera 1 sisanya atau 117 KK masuk keluarga Sejahtera II dan Plus.

Sedangkan pada tahun 2019 yang terdata lebih banyak lagi yakni 801 keluarga dengan pembagian 12 keluarga kategori Pra KS dan ada 154 keluarga Sejahtera 1 ini menandakan bahwa perlu adanya perhatian serius terhadap komitmen membangun program Kampung KB agar target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik dan tepat sasaran, untuk tingkat presentase Pra KS dan KS 1 dari tahun 2018-2019 ada selisih sekita kurang lebih 10%, hal tersebut dikarenakan jumlah keluarga yang di data ditahun 2018 ada 131 keluarga dan yang di data di 2019 ada 801 keluarga yang terdata sehingga wajar terjadi selisih dalam pencapaian presetasinya setiap tahun yang menandakan harus lebih diperkuat untuk pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kampung KB.

Selanjutnya terkait dengan capaian Peserta KB aktif jika melihat data dari hasil penelitian yang ada terkait Peserta KB aktif MKJP presentase Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Swarga Bara masih rendah dimana tahun 2018 hanya 13% dan di 2019 hanya 23,33%, padahal target dari pemerintah mencapai 50% untuk PUS menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Sedangkan untuk yang Non MKJP pencapaiannya sudah cukup tinggi dimana ditahun 2018 dari 107 PUS 55 PUS menggunakan Metode Non MKJP atau menggunakan alat kontrasepsi seperti suntik, pil, kondom maupun tradisional, kemudian ditahun 2019 capainya mencapai 56,45% atau dari 643 PUS 213 telah menggunakan kontrasepsi non MKJP atau menjadi peserta KB aktif, tetapi menjadi persoalan adalah terkait dengan PUS KB aktif yang belum terlayani masih ada untuk tahun 2018 saja ada 35,51% atau 38 PUS yang belum terlayani dari 107 PUS yang ada, sedangkan di tahun 2019 ada 280 PUS yang tidak terlayani dari 643 PUS yang ada, ini berarti perlu adanya penyuluhan dan peningkatan pelayanan Keluarga Berencana di Kampung di Desa Swarga Bara.

Secara umum terkait data pencapaian peserta KB aktif di Kampung KB di Desa Swarga Bara tahun 2018-2019 perlu ada peningkatan penyuluhan yang dilakukan dan peningkatan pelayanan Keluarga Berencana yang ada di Kampung KB sehingga PUS yang belum terlibat menjadi peserta KB dan yang belum terlayani dapat dijangkau dan diakases serta terlibat menjadi peserta KB aktif.

Sedangkan terkait dengan partisipasi kelompok kegiatan dalam program Kampung KB diketahui bahwa untuk tingkat partisipasi kelompok kegiatan dalam program Kampung KB mengalami fluktuasi yang tidak stabil atau mengalami turun naik, dimana dapat kita lihat untuk partisipasi keluarga yang memiliki balita dalam BKB di tahun 2018 capaiannya mencapai 25% dan di 2019 ada kenaikan yakni diangkat 53%, artinya keterlibatan keluarga dalam pembinaan BKB mengalami kenaikan. Sebaliknya pada partisipasi keluarga yang memiliki balita dalam BKR

mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 capaian keluarga yang terlibat dalam BKR mencapai 35% dan di tahun 2019 menjadi 15,43%, terlihat adanya penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada capaian partisipasi keluarga yang memiliki balita dalam BKL mengalami peningkatan sedikit saja yakni di tahun 2018 4,5% menjadi 5,3% di tahun 2019. Selanjutnya untuk pencapaian partisipasi keluarga dalam kelompok UPPKS masih terbilang rendah dimana pada tahun 2018 tidak ada keluarga yang terlibat dalam kegiatan di Kampung KB dan baru ditahun 2019 ada 3,75% keluarga yang terlibat dalam kelompok UPPKS.

Berdasarkan data yang disajikan menunjukkan untuk capaian partisipasi kelompok kegiatan dalam kegiatan program Kampung KB masih terbilang rendah, untuk itu perlu ada perhatian dan komitmen yang lebih serius untuk keberlanjutan dari Program Kampung KB ini.

### ***Faktor Pendukung dan Penghambat***

Sekaitan dengan Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara berdasarkan hasil evaluasi penulis bahwa yang menjadi factor-faktor pendukung dalam program tersebut adalah Keterseiaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana & Tenaga Penggerak Desa (TPD) yang memadai, kemudian komitmen dukungan dari dinas terkait serta dukungan dan komitmen dari Pengurus Kampung KB. Sedangkan yang menjadi faktor-faktor penghambatnya adalah keterbatasan anggaran atau dukungan anggaran yang masih minim, partisipasi masyarakat dalam kegiatan Program Kampung KB yang masih rendah dan ketersediaan sarana dan prasaran yang belum optimal atau mendukung secara penuh.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan disimpulkan bahwa hasil evaluasi Pelaksanan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dilihat dari indikator input, proses dan output menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik, pertama hal ini terlihat dari ketersediaan Tenaga PKB/PLKB yang memadai tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas, pelatihan, pembinaan kemampuan dan keahlian PKB/PLKB terhadap konsep pengelolaan Kampung KB, kedua terbatasnya dukungan dana operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung KB, ketiga terkait dengan sarana dan prasaran yang masih minim di Kampung KB khususnya tidak adanya sekretariat Kampung KB, keempat terkait Pelayanan Kependudukan (Pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran dll) belum dapat dilaksanakan dikarenakan terkendala oleh tidak adanya MoU ataupun perjanjian kerjasama, kemudian kelima terkait mengadvokasi mitra kerja dan masyarakat yang masih rendah ditunjukkan dengan sosialisasi Kampung KB yang jarang dilakukan, keenam terkait pemibinaan Kelompok Tri Bina (BKB,BKR,BKL) yang masih terbatas dilakukan dimana dalam 2 bulan hanya 1 kali pembinaan yang seharusnya 1 bulan 2-3 kali pembinaan, selain itu pada pembinaan kelompok UPPKS yang minim bantuan permodalan serta pelatihan penciptaan atau peningkatan produk rumahan. Selain itu juga terkait dengan pencapaian indikator output berupa pencaian peserta KB aktif dan partisipasi kelompok kegiatan dalam program Kampung KB yang masih rendah dari target yang ditetapkan. Hanya pada kegiatan pendataan keluarga dan pelayanan KB yang dapat berjalan dengan baik.

### Saran-Saran

Berdasarkan ulasan pembahasan dan penarikan kesimpulan yang diambil, maka penulis memberikan saran-saran perbaikan terhadap hambatan-hambatan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan Pembinaan dan Pelatihan secara periodik dan berkelanjutan terhadap Tenaga PKB/PLKB dan TPD dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kemampuan teknis lainnya dalam pengelolaan Kampung KB yang masih jarang dilakukan.
2. Membangunkan sekretariat Kampung KB yang belum ada di wilayah Kampung KB sebagai tempat sentral pelaksanaan berbagai Kegiatan-kegiatan di Kampung KB.
3. Memberikan dukungan anggaran yang proposional untuk Kampung KB melalui pendanaan APBD yang belum pernah dianggarkan
4. Membuat MoU ataupun Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pengendalian Penduduk & KB (Penanggungjawab Kampung KB) dengan Dinas Kependudukan & Catatan Sipil (Penanggungjawab Pelayan Kependudukan) terkait pelayanan kependudukan terintegrasi di Kampung KB untuk dapat dijalankan.

### Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Bridgman, Peter and Davis, Glyn. 2000. *The Australian Policy Handbook*. Australia: Allen & Unwin.
- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014 *Analaisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-ruzzmedia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)* Yogyakarta: PT Buku Seru.

### Dokumen-dokumen

- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Petunjuk Teknis Program Kampung KB Tahun 2015 oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur.
- Surat Edaran Mendagri No.440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016, perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB seluruh Indonesia.
- Surat Kepala BKKBN Pusat No. 046/BL/200/B4/2016 Tanggal 12 Januari 2016, Perihal Siaran Langsung Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB di seluruh Indonesia.

### Sumber Internet :

<https://.bps.go.id,2019>